

Evaluasi Program Kartu Tani dalam Meningkatkan Produktifitas Petani di Kabupaten Blora

Evaluation of the Kartu Tani Program in Increasing Farmer Productivity in Blora District

Hegar Satya Rizki*¹, Pandhu Yuanjaya²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 23-10-24

Diperbaiki 25-10-24

Disetujui 28-10-24

Kata Kunci:

Model CIPP, Evaluasi Program, Produktifitas Petani, Subsidi Pupuk

ABSTRAK

Program kartu tani diimplementasikan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi distribusi pupuk bersubsidi serta mendorong produktifitas dan kesejahteraan petani. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora belum sepenuhnya optimal. Pada tahap *context*, program ini relevan dengan kebutuhan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi secara adil, tetapi rendahnya literasi teknologi petani dan data RDKK yang tidak mutakhir menjadi kendala utama. Pada tahap *input*, keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan pendampingan kepada petani mengurangi efektifitas pelaksanaan program. Pada tahap *process*, hambatan teknis seperti *error* pada mesin EDC dan kurangnya koordinasi antara *stakeholder* menjadi tantangan signifikan. Pada tahap *product*, program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas lahan di beberapa wilayah, terutama bagi petani yang berhasil mengakses pupuk sesuai kebutuhan. Namun, dampak terhadap kesejahteraan petani masih terbatas karena biaya faktor produksi lainnya, seperti pestisida dan benih yang tinggi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perbaikan pada sistem pendataan petani, optimalisasi infrastruktur teknologi, dan peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan efektifitas program.

ABSTRACT

Keywords:

The CIPP Model, Program Evaluation, Farmer Productivity, Fertilizer Subsidy

The kartu tani program was implemented as a solution to improve the transparency of subsidized fertilizer distribution and encourage the productivity and welfare of farmers. The methodology used in this research is a descriptive approach with qualitative methods. The research data was obtained through in-depth interviews with stakeholders involved in the implementation of the farmer card program in improving farmers' productivity in Blora District. The results showed that the implementation of the farmer card program in Blora District was not fully optimal. At the *context* stage, the program is relevant to the needs of farmers to access subsidized fertilizer fairly, but the low technological literacy of farmers and outdated RDKK data are the main obstacles. At the *input* stage, limited budget, infrastructure and assistance to farmers reduce the effectiveness of program implementation. At the *process* stage, technical obstacles such as errors in EDC machines and lack of coordination between stakeholders are significant challenges. At the *product* stage, the program contributed to increased land productivity in some areas, especially for farmers who managed to access fertilizer as needed. However, the impact on farmers' welfare is still limited due to the high cost of other production factors, such as pesticides and seeds. The implication of this study is the importance of improving the farmer data collection system, optimizing technological infrastructure, and increasing socialization to increase the effectiveness of the program.

1. Pendahuluan

Program kartu tani adalah sebuah program yang dirancang oleh Kementan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi, penjualan hasil panen tanpa perantara, pembayaran kredit usaha, tabungan dan bantuan sosial. Untuk menerbitkan kartu tani yang memiliki fungsi sama dengan kartu debit atau ATM, pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Program kartu tani dimulai pada tahun 2018 untuk Pulau Jawa, kemudian diperluas lagi ke 10 Provinsi lain di luar Pulau Jawa [1]. Penerima yang berhak menerima kartu tani adalah petani yang mengelola salah satu dari sembilan komoditas pertanian utama Indonesia, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu dan kakao.

Berdasarkan publikasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerbitan kartu tani dimaksudkan untuk meningkatkan budaya transaksi non tunai di masyarakat, khususnya para petani [2]. Penerbitan kartu tani juga bertujuan untuk memulai paradigma baru dalam pemberian subsidi pupuk, yaitu pemberian Bantuan Langsung Pupuk (BLP) kepada petani miskin dan hampir miskin. Kartu tani memiliki fungsi yang hampir sama dengan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang membedakan hanya kepemilikannya. Pemilik kartu tani hanya eksklusif untuk para petani yang secara aturan dan ketentuan yang berlaku benar-benar berhak atas bantuan langsung pupuk [3]. Penggunaan kartu tani sebagai kartu debit dan tabungan multifungsi yang terintegrasi langsung dengan Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020.

Kartu tani dapat digunakan petani untuk transaksi jasa keuangan secara umum dan juga dapat dimanfaatkan untuk pembelian pupuk bersubsidi [4]. Namun dalam praktiknya, program ini sering disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pengecer, tengkulak, atau oknum aparat. Program pupuk bersubsidi seharusnya menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani. Tetapi sering terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran karena adanya paketan pupuk non subsidi, penimbunan, atau pengalihan pupuk. Selain itu, juga terjadi kelangkaan dan kekurangan pupuk karena adanya perbedaan antara alokasi dan realisasi pupuk. Sayangnya kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan luas 1.955,82 Km². Luas wilayah tersebut terbagi atas lahan persawahan sebesar 459.4819 km² dan lahan tegalan dengan luas 261.8837 km². Berdasarkan publikasi data BPS kabupaten, pemerintah mencatatkan bahwa Kabupaten Blora memiliki sekitar 25.23% lahan sawah dan sekitar 14.38% adalah lahan tegalan. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa total luas lahan pertanian di Kabupaten Blora mencapai angka 39.61% dari luas total keseluruhan wilayahnya. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan faktor produksi pertanian seperti pupuk dan urea sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil panen penduduk [5].

Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut melalui perspektif evaluatif agar hasil penelitian menjadi lebih

komprehensif. Evaluasi program memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan program yang dirancang mencapai tujuan dan memberikan dampak yang diharapkan [6]. Dalam era pembangunan yang berbasis pada akuntabilitas dan transparansi, program-program pemerintah yang menysasar sektor vital seperti pertanian harus dievaluasi secara menyeluruh [7]. Selain itu, evaluasi program juga dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan dengan pendekatan yang lebih baik.

Namun sayangnya penelitian yang membahas tentang evaluasi program kartu tani dengan model evaluasi CIPP masih belum atau sangat sedikit dilakukan. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi research gap atas penelitian evaluasi program subsidi di sektor pertanian yang berfokus pada pembahasan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora. Kartu tani diberikan kepada anggota kelompok tani yang terdaftar dan berperan sebagai unit dasar yang menerima manfaat dari program ini. Informasi yang tercatat tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan program yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif menggunakan pendekatan yang sistematis seperti model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi petani dalam mengakses dan menggunakan kartu tani, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas program dalam mendukung peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora.

2. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait isu-isu atau permasalahan yang sedang terjadi melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan objek penelitian yang terlibat langsung [8]. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blora dengan tujuan untuk mengekspos dan menjawab keresahan para petani terkait tingginya harga pupuk bersubsidi dan sulitnya akses terhadap faktor produksi pertanian yang lebih terjangkau. Selain itu, pemilihan Kabupaten Blora sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Blora telah menerapkan kebijakan subsidi pupuk dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani sejak tahun 2017 dengan melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyedia jasa perbankan.

Informan dalam sebuah penelitian merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang dari penelitian, serta dapat memberi masukan mengenai sumber bukti yang mendukung [9]. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan subjek sebagai informan penelitian didasarkan pada pertimbangan kognisi, kompetensi, dan kapabilitas para informan dalam konteks pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui

narasumber penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu tani yaitu DP4 Kabupaten Blora, BRI Unit Kecamatan Sambong, BPP Kecamatan Jiken dan Cepu, KPL Kecamatan Randublatung, serta perwakilan anggota kelompok tani dan petani non anggota kelompok tani.

Tahapan dalam memperoleh data penelitian dimulai dengan peneliti turun langsung ke lapangan. Setelah melakukan penelitian lapangan, data yang berhasil dikumpulkan akan direduksi dan diseleksi sehingga menyisakan data yang lebih relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah ditelaah dan direduksi kemudian dianalisis dengan menggunakan teori utama penelitian, yaitu evaluasi dengan model CIPP. Setelah dianalisis, data tersebut disajikan dalam bentuk teks narasi yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan setelah tahap analisis selesai sehingga hasil yang dapat diperoleh dalam penelitian ini berfokus pada hasil evaluasi pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora. Setelah mendapat data penelitian yang lebih valid melalui proses triangulasi sumber, data-data tersebut kemudian dikumpulkan untuk proses komplementarisasi. Komplementarisasi data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi informasi yang diberikan oleh responden melalui berbagai metode pengumpulan data.

3. Hasil dan Pembahasan

Program kartu tani bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para petani dalam mengakses bantuan pemerintah seperti pupuk bersubsidi, penjualan hasil panen, pembayaran kredit usaha, tabungan dan bantuan sosial [10]. Melalui pengadaaan program kartu tani, pemerintah juga berharap kesejahteraan petani dapat ditingkatkan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan hasil produksi pertanian sampai dengan keberhasilan dalam ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi nasional. Di Kabupaten Blora, program kartu tani dijalankan melalui kolaborasi antara Dinas Pertanian, BRI, dan KPL. Tahapan pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora meliputi:

- a. Pendaftaran petani melalui kelompok tani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- b. Distribusi kartu tani dengan cara menyerahkan kartu kepada petani yang sudah diverifikasi.
- c. Petani dapat menggunakan kartu tani untuk mengakses pupuk bersubsidi melalui transaksi elektronik di kios mitra menggunakan kartu tersebut.

Meskipun program kartu tani dirancang untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, namun peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program kartu tani yang menjadi hambatan dalam peningkatan produktifitas petani di Kabupaten Blora. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi peneliti dalam pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya anggaran untuk penambahan anggota atau SDM.
- b) Kuota pupuk terkadang tidak mencukupi kebutuhan aktual petani.
- c) Banyak petani merasa program ini hanya menambah kerumitan dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
- d) Rendahnya pemanfaatan Kartu Tani untuk tujuan lain, seperti akses kredit usaha.
- e) Gangguan jaringan terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas.

Evaluasi program kartu tani di Kabupaten Blora dengan menggunakan model CIPP dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Dalam konteks penelitian ini, model evaluasi CIPP dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora dengan cara berikut:

- (a) Konteks: Mengidentifikasi kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi dan relevansi program dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.
- (b) Input: Mengevaluasi sumber daya seperti teknologi (mesin EDC), tenaga kerja, dan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program.
- (c) Proses: Memantau pelaksanaan program, termasuk kendala teknis dan tingkat partisipasi petani.
- (d) Produk: Mengukur dampak program terhadap produktifitas pertanian dan kesejahteraan petani.

3.1 Evaluasi Konteks Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Blora

Evaluasi konteks dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana program kartu tani di Kabupaten Blora mampu menjawab kebutuhan lokal dan mengatasi masalah-masalah yang ada, serta bagaimana tujuan dari program tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan penjelasan dari narasumber DP4, pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora hadir untuk menjawab tantangan seperti kebutuhan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Sebelum adanya program program kartu tani, distribusi pupuk di Kabupaten Blora sering tidak merata dan rawan penyelewengan. Dengan adanya kartu tani, data petani diharapkan lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan alokasi subsidi [11]. Selain itu, banyaknya petani di Blora yang belum memahami sistem transaksi perbankan, sehingga program ini sekaligus bertujuan meningkatkan keterampilan mereka dalam memanfaatkan layanan keuangan. Namun, relevansi ini belum sepenuhnya tercapai dikarenakan kurangnya pemahaman petani terhadap fungsi kartu tani. Banyak petani yang tidak mengerti bagaimana kartu ini membantu mereka dalam mendapatkan

subsidi. Berdasarkan wawancara, data RDKK sering tidak sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan, menyebabkan ketimpangan alokasi pupuk.

Relevansi program dengan kebutuhan lokal sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat, karena program yang tidak relevan cenderung mengalami resistensi dari komunitas [12]. Identifikasi masalah dalam konteks pelaksanaan program kartu tani di Blora mencakup rendahnya literasi petani terhadap teknologi, ketidaksesuaian kuota pupuk dengan kebutuhan, dan fluktuasi ketersediaan pupuk. Banyak petani kesulitan menggunakan kartu dan mesin EDC di kios pupuk, sehingga transaksi sering terhambat. Selain itu, data wawancara menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan data kartu tani sering tidak mencukupi kebutuhan petani. Beberapa kios melaporkan keterlambatan pengiriman pupuk, terutama pada musim tanam, sehingga petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.

Penilaian kebutuhan masyarakat merupakan langkah awal yang penting dalam merancang program yang efektif dengan melibatkan indentifikasi kebutuhan spesifik yang dirasakan oleh komunitas target [13]. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa program kartu tani memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan petani di Kabupaten Blora. Program kartu tani dirancang untuk meningkatkan produktifitas pertanian melalui distribusi pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan menurunkan biaya produksi melalui subsidi pupuk [14]. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora juga bertujuan untuk memberdayakan petani secara ekonomi dengan akses perbankan yang lebih luas melalui integrasi kartu tani dengan layanan keuangan.

Namun, data penelitian dan hasil wawancara menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut di Blora. Sebagian besar petani merasa program ini lebih menambah kerumitan dibandingkan memberikan solusi nyata. Hal ini terkait dengan masalah teknis dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya pelatihan dan pendampingan. Evaluasi konteks menunjukkan bahwa program ini relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi hambatan seperti literasi petani yang rendah dan data yang kurang akurat mengurangi efektivitasnya. Relevansi program terhadap produktifitas dan kesejahteraan petani belum sepenuhnya tercapai karena masalah dalam pengumpulan data dan distribusi subsidi.

3.2 Evaluasi Input (Sumber Daya dan Dukungan)

Untuk memastikan masukan dan dukungan program, dalam evaluasi input terdapat beberapa indikator yaitu sumber daya yang tersedia, anggaran, tenaga kerja dan fasilitas, serta bahan yang digunakan dalam program [15]. Namun, wawancara dengan Dinas Pertanian Blora menunjukkan bahwa anggaran ini tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua petani, terutama saat terjadi fluktuasi harga pupuk atau kenaikan jumlah petani. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi program pelatihan dan

sosialisasi kepada petani, sehingga banyak petani tidak sepenuhnya memahami manfaat program [16]. Pemerintah menyediakan anggaran untuk subsidi pupuk, pengadaan kartu tani, dan penyediaan perangkat EDC di Kios Pupuk Lengkap (KPL). Namun, wawancara dengan DP4 Kabupaten Blora menunjukkan bahwa anggaran ini tidak selalu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua petani, terutama saat terjadi fluktuasi harga pupuk atau kenaikan jumlah petani. Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan program kurang optimal, terutama dalam menjangkau petani yang belum familiar dengan teknologi kartu tani. Selain itu, kurangnya alokasi untuk memperbarui data petani berkontribusi pada ketidaktepatan alokasi kuota pupuk. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi program pelatihan dan sosialisasi kepada petani, sehingga banyak petani tidak sepenuhnya memahami manfaat program.

Program kartu tani di Kabupaten Blora melibatkan tenaga kerja dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, BRI, dan pemilik KPL. Berdasarkan wawancara, banyak penyuluh pertanian merasa kewalahan karena beban kerja mereka meningkat akibat program ini. Para petani mengeluhkan kurangnya pendampingan dalam menggunakan kartu tani, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Selain itu, rendahnya literasi petani terhadap fungsi kartu tani sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan tenaga pendamping yang memadai. Pemerintah daerah belum menyediakan insentif atau pelatihan tambahan bagi tenaga penyuluh, sehingga kemampuan mereka dalam membantu petani terbatas. Pengadaan mesin EDC di KPL menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung program ini. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa gangguan teknis pada mesin EDC sering terjadi, seperti jaringan lemah di beberapa daerah. Ketersediaan mesin EDC masih terbatas, sehingga antrian petani untuk membeli pupuk sering kali panjang. Masalah teknis pada infrastruktur menyebabkan hambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi, yang memengaruhi produktifitas petani secara langsung. Petani di daerah terpencil merasa program ini lebih menyulitkan karena sulitnya mengakses KPL yang memiliki fasilitas EDC. Evaluasi input menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora didukung oleh berbagai sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja. Namun, keterbatasan pada setiap aspek input ini menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan program, yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani.

Wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan BRI menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah dan perbankan untuk mendukung pelaksanaan program, tetapi kurangnya partisipasi aktif pemerintah menjadi perhatian utama. Banyak petani merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah minim dan tidak menjawab kebutuhan mereka. Keterlibatan BRI dalam penyediaan kartu dan mesin EDC telah berjalan cukup baik, tetapi bank tidak selalu terlibat dalam memberikan edukasi keuangan kepada petani. Dukungan yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar stakeholder

dalam memperbarui data petani menyebabkan ketidaksesuaian kebutuhan dengan pasokan menghambat efektifitas program.

3.3 Evaluasi Proses Pelaksanaan Program

Dalam konteks pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora, program tersebut melibatkan berbagai tahapan operasional seperti pendaftaran dan verifikasi petani dengan mengumpulkan data petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diverifikasi untuk memastikan penerima subsidi adalah petani yang berhak. Kemudian, distribusi kartu tani disalurkan kepada petani melalui kelompok tani dan Dinas Pertanian. Sedangkan BPP membantu kelompok tani dalam pelaksanaan program melalui pendampingan teknis dan monitoring penebusan pupuk. anggota BPP memastikan bahwa penebusan pupuk bersubsidi dilakukan oleh petani yang berhak dan sesuai dengan RDKK yang telah BPP dan kelompok tani susun bersama. Setelah mendapatkan kartu tani, para petani menggunakan kartu tersebut untuk membeli pupuk di Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang telah dilengkapi dengan mesin EDC.

Namun sayangnya, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa banyak petani merasa kesulitan memahami prosedur penggunaan kartu, terutama dalam pengoperasian mesin EDC di KPL. Selain itu, narasumber perwakilan kelompok tani menganggap bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan banyak petani tidak mengetahui manfaat penuh dari kartu tani. Evaluasi pelaksanaan program mencakup analisis terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi program, serta identifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi [17]. Program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora menggunakan pendekatan berbasis digital untuk distribusi pupuk bersubsidi. Melalui sistem elektronik, data petani, kebutuhan pupuk, dan transaksi tercatat secara digital melalui kartu tani. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan layanan perbankan yang mendukung transaksi elektronik. Namun data hasil wawancara dalam penelitian ini mencatat sering terjadinya error pada sistem transaksi, terutama di daerah dengan jaringan internet yang lemah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di beberapa kios pupuk yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk mendukung penggunaan kartu secara optimal.

Efektifitas pelaksanaan program dapat diukur melalui pencapaian tujuan program, kepuasan penerima manfaat, dan dampak jangka panjang yang dihasilkan [18]. Pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa program kartu tani mampu meningkatkan transparansi dalam distribusi pupuk bersubsidi, mengurangi risiko penyelewengan. Namun sayangnya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena banyak petani merasa alur program lebih memberatkan dibandingkan manfaat yang dirasakan. Berdasarkan data penelitian dan hasil wawancara mencatat kelangkaan pupuk yang sering terjadi, sehingga petani merasa program ini belum memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan mereka. Selain itu,

minimnya koordinasi antar-instansi seperti Dinas Pertanian dan BRI masih kurang optimal sehingga menyebabkan kelambatan penyelesaian masalah teknis. BRI mengamati bahwa program ini efektif dalam menjangkau petani di daerah pedesaan yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan, meskipun masih ada tantangan dalam hal literasi keuangan dan teknologi di kalangan petani. Selain dalam hal penebusan pupuk bersubsidi, BRI menilai program kartu tani kurang berhasil dalam meningkatkan literasi keuangan dan perbankan petani.

3.4 Evaluasi Produk (Hasil) Pelaksanaan Program

Dampak program harus diukur untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang diharapkan, termasuk dalam perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, serta dampak ekonomi [19]. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, beberapa petani melaporkan peningkatan hasil panen, terutama di wilayah yang distribusi pupuknya berjalan lancar. Petani yang menggunakan pupuk sesuai dosis anjuran menunjukkan hasil yang lebih optimal dibandingkan petani yang masih menggunakan pupuk berlebih. Namun menurut pemaparan BPP dan KPL, masalah utama dalam pelaksanaan program adalah fluktuasi alokasi bantuan pupuk oleh pemerintah dan keterlambatan distribusi pupuk pada musim tanam kritis mengurangi dampak positif program terhadap produktifitas. Selain itu, masalah terkait ketidaktepatan data petani yang kurang mutakhir dalam RDKK menyebabkan ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan riil di lapangan.

Melalui wawancara, DP4 menjelaskan bahwa hasil program kartu tani di Kabupaten Blora dalam meningkatkan kesejahteraan petani diwujudkan dengan penghematan biaya produksi melalui akses pupuk bersubsidi memberikan sedikit ruang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Petani mulai mengenal sistem perbankan dan layanan keuangan lainnya melalui integrasi program ini dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Namun, keterbatasan terkait tingginya harga faktor produksi lain seperti biaya pestisida, benih, dan alat pertanian masih cukup mahal, sehingga menurunkan daya beli petani. Kemudian juga kelompok tani menjelaskan bahwa banyak petani merasa bahwa penggunaan kartu tani menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat signifikan.

Selain itu, sebagian besar petani belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan kartu tani untuk keperluan lain, seperti akses kredit usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPP dan kelompok tani, tingkat kepuasan petani terhadap program ini cenderung menurun karena prosedur yang dianggap lebih kompleks dibandingkan sistem sebelumnya. Banyak petani mengeluhkan kurangnya informasi dan pendampingan, terutama terkait cara menggunakan kartu tani secara efektif. Meskipun program kartu tani di Kabupaten Blora memiliki dampak positif pada beberapa aspek, ketidakpuasan petani menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam pelaksanaan dan sosialisasi program. Evaluasi hasil menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan

produktifitas dan kesejahteraan petani karena kendala teknis dan operasional. Produk program, seperti akses pupuk bersubsidi dan literasi keuangan, telah memberikan manfaat, tetapi dampaknya belum merata di semua wilayah karena keterbatasan input dan proses.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, pembahasan terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora terdapat beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP (*context, input, process, product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Coryn, (2014). Model evaluasi CIPP memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi berbagai aspek dari program kartu tani melalui evaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan program, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi para petani.

Evaluasi konteks pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa program tersebut relevan dengan kebutuhan petani, terutama dalam meningkatkan akses pupuk bersubsidi secara transparan. Namun, rendahnya literasi petani terhadap teknologi serta data RDKK petani yang tidak mutakhir menjadi penghambat efektifitas pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Blora. Kendala awal pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora adalah penolakan dari para petani karena menganggap program tersebut akan menyulitkan mereka dalam mendapat pupuk.

Sedangkan jika ditinjau dari segi input sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas pendukung seperti jaringan infrastruktur serta sarana dan prasarana pertanian lain belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Kurangnya pelatihan kepada petani juga memperburuk pemanfaatan kartu tani sehingga tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui sistem perbankan digital kurang maksimal. Selain itu, DP4 mencatat bahwa keterbatasan anggaran dan dana yang dialokasikan tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dan tenaga administrasi, kekurangan tenaga kerja yang kompeten serta infrastruktur teknologi yang belum optimal menjadi tantangan dalam memastikan program berjalan lancar.

Evaluasi proses pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut menghadapi banyak tantangan teknis, seperti gangguan sistem transaksi dan koordinasi yang kurang antara stakeholder. Partisipasi kelompok tani dan pemangku kepentingan lainnya juga masih minim, padahal pelaksanaan program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora melibatkan koordinasi antar berbagai stakeholder seperti DP4, BPP, BRI, kelompok tani, dan kios pertanian. Proses sosialisasi memerlukan upaya tambahan karena literasi teknologi petani yang rendah, sehingga menyebabkan tahap verifikasi serta pendataan sering kali mengalami keterlambatan akibat keterbatasan tenaga kerja.

Evaluasi produk atau hasil dari program kartu tani di Kabupaten Blora menunjukkan dampak positif dalam peningkatan transparansi distribusi pupuk dan penghematan biaya produksi serta peningkatan literasi keuangan, tetapi sayangnya masih belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kepuasan petani terhadap program menurun akibat kompleksitas administrasi dan keterbatasan kuota pupuk, sehingga dampak yang dihasilkan oleh kartu tani belum signifikan dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani secara merata. Selain itu, tantangan terkait kuota pupuk yang tidak mencukupi dan keberlanjutan program masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi kuota pupuk bersubsidi dan rendahnya literasi teknologi petani menjadi kendala utama keberhasilan program dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Blora. Selain itu, kurangnya koordinasi antara stakeholder (Dinas Pertanian, KPL, BRI) menyebabkan implementasi program berjalan tidak efisien. Padahal program kartu tani memiliki potensi besar jika diperbaiki dari sisi sistem distribusi dan pendampingan petani. Sayangnya data penelitian ini terbatas hanya di Kabupaten Blora, sehingga temuan penelitian hanya mencakup konteks lokal Kabupaten Blora, sehingga tidak bisa digeneralisasikan ke wilayah lain dengan kondisi berbeda. Keterbatasan responden juga terjadi karena sebagian besar data berasal dari wawancara dengan petani dan stakeholder tertentu, sehingga belum mencakup seluruh pihak yang terlibat, seperti pemerintah pusat atau pihak swasta lain. Selain itu, penelitian terkait evaluasi program kartu tani dalam meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Blora ini juga dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas, sehingga evaluasi terhadap dampak jangka panjang belum bisa dilakukan. Oleh karena itu, rekomendasi pengembangan penelitian berikutnya dapat mencakup perbandingan implementasi program kartu tani di daerah lain untuk mendapatkan gambaran lebih luas dan melakukan penelitian tentang efek jangka panjang program kartu tani terhadap kesejahteraan petani, termasuk akses terhadap kredit usaha dan investasi alat pertanian.

Referensi

- [1] A. B. Martin, "PLAN FOR PROGRAM EVALUATION FROM THE START," *National Institute of Justice*, no. 275, 2015, [Online]. Available: www.NIJ.gov
- [2] A. A. G. Ekayana and I. G. Ratnaya, "Evaluasi Kurikulum Program Sarjana Sistem Komputer Menggunakan Model CIPP Stufflebeam," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.23887/jppp.v6i3.49622.
- [3] M. Zakaria, W. Jun, and M. F. Khan, "Impact of financial development on agricultural productivity in South Asia," *Agricultural Economics (Czech Republic)*, vol. 65, no. 5, 2019, doi: 10.17221/199/2018-AGRICECON.
- [4] D. L. Stufflebeam and C. L. S. Coryn, *Evaluation Theory, Models, and Applications*, Second Edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- [5] L. J. Moleong, "Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.," *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- [6] R. Syawal, "SIPINTER MOREN (SISTEM INFORMASI PANGAN TERINTEGRASI UNTUK MONEV DAN PERENCANAAN)," Jakarta, Nov. 2021.

- [7] B. Admin, "Manfaat Kartu Tani untuk Petani yang Harus Diketahui," Balai Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Buleleng.
- [8] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA," Jakarta, 2020.
- [9] A. R. P. Setiawan, I. T. Noor, L. Sulistyowati, and I. Setiawan, "ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI KEDELAI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) DAN NILAI TUKAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI (NTPRP)," *Jurnal Agribisnis Terpadu*, pp. 178–189, 2019.
- [10] A. Fanani, A. , Zainuddin, and R. Desfaryani, "Dampak Adanya Kelembagaan Pertanian terhadap Keputusan Petani dalam Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Jember," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.21776/ub.jepa.2022.006.03.13.
- [11] R. Riki, A. Abdal, and W. S. Abdillah, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani Untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang Tahun 2021," *Journal of Law, Administration, and Social Science*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.54957/jolas.v2i2.198.
- [12] B. Budiandrian, F. Azzahra, and A. Setyadi, "Peran Organisasi Petani dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Petani di Indonesia," *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension*, vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.35706/agrimanex.v2i2.6477.
- [13] F. Anisa and M. F. Adnan, "Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, vol. 5, no. 4, 2021, doi: 10.58258/jisip.v5i4.2496.
- [14] B. Mahendra, S. Suprpto, and H. Barima, "PENGARUH PROGRAM KARTU TANI TERHADAP PENURUNAN BIAYA PUPUK PADA PETANI PADI," *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, vol. 20, no. 2, pp. 411–420, Sep. 2021, doi: 10.31186/jagrisep.20.2.411-420.
- [15] R. S. Jorgi, S. Gayatri, and T. Dalmiyatun, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kabupaten Semarang," *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, vol. 5, no. 2, 2019, doi: 10.18196/agr.5278.
- [16] A. Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, vol. 5, no. 2, pp. 146–150, 2020.
- [17] Hardani, H. Andriani, J. Ustiawaty, and et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. 2020. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- [18] I. Kholis and K. Setiaji, "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi," *Economic Education Analysis Journal*, vol. 9, no. 2, 2020.
- [19] P. Adiraputra and D. Supyandi, "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK DI DESA SUKAASIH KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN BEKASI," *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.25157/ma.v7i1.4745.